

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dalam beberapa dekade terakhir mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Jika sebelumnya pembangunan desa lebih berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, kini arah kebijakan pembangunan desa menekankan pada penguatan kapasitas ekonomi lokal melalui inovasi berbasis potensi desa. Perubahan paradigma ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan merancang program pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang mampu menciptakan berbagai terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan keuangan desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, hingga pengembangan usaha ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kewenangan tersebut, desa didorong untuk mampu menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal menjadi berbagai program inovatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini membuka ruang bagi munculnya berbagai model inovasi desa, termasuk pengembangan desa wisata yang

memadukan potensi ekonomi, sosial, budaya, maupun sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian desa.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan inovasi pembangunan desa juga didukung oleh berbagai regulasi lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai bentuk inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menjelaskan bahwa inovasi merupakan segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan potensi yang dimiliki desa melalui proses perencanaan yang partisipatif. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan pada penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki legitimasi sekaligus tanggung jawab untuk menciptakan inovasi yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan paradigma pembangunan desa tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah melalui berbagai kebijakan mendorong setiap desa untuk mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks ini, inovasi desa tidak lagi dipahami hanya sebagai pembentukan program baru, melainkan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan model tata kelola pembangunan yang adaptif,

kolaboratif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh ide yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Salah satu bentuk implementasi inovasi pembangunan desa tersebut dapat ditemukan di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember melalui Program Wisata Investasi Domba. Program ini diluncurkan pada tanggal 14 September 2023 oleh Bupati Jember dalam rangka peringatan Selamatan Desa ke-110. Program ini merupakan inovasi pembangunan ekonomi desa yang mengintegrasikan sektor peternakan rakyat, investasi masyarakat, dan wisata edukasi dalam satu model pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha peternakan, tetapi juga diberikan kesempatan menjadi investor dengan menanamkan modal pada usaha ternak domba yang dikelola secara kolektif oleh kelompok peternak desa. Model tersebut menunjukkan adanya transformasi pembangunan desa dari pendekatan bantuan menuju pendekatan pemberdayaan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok peternak, dan masyarakat.

Keunikan Program Wisata Investasi Domba terletak pada model kolaboratif yang menghubungkan pemerintah desa, kelompok peternak, dan masyarakat sebagai investor dalam satu sistem ekonomi lokal. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini melibatkan sekitar 30 kelompok peternak dengan populasi sekitar 250 ekor domba. Dalam kurun waktu kurang lebih satu setengah tahun, jumlah ternak berkembang menjadi sekitar 400 ekor. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya respons positif masyarakat terhadap program yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Suco. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui investasi peternakan, program ini juga dikembangkan sebagai wisata edukasi yang memperkenalkan potensi peternakan kepada masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembangan sektor pariwisata desa.

Program Wisata Investasi Domba merupakan bentuk inovasi yang relatif berbeda dibandingkan dengan inovasi desa pada umumnya. Sebagian besar inovasi pembangunan desa di Indonesia masih berorientasi pada pengembangan desa

wisata berbasis budaya, pertanian, maupun usaha mikro. Sementara itu, Program Wisata Investasi Domba mengombinasikan sektor peternakan, investasi masyarakat, dan wisata edukasi ke dalam satu model pembangunan ekonomi desa. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadikan program ini memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi peternakan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi lokal melalui partisipasi masyarakat sebagai investor sekaligus memperkenalkan potensi peternakan sebagai daya tarik wisata.

Dalam implementasinya, Program Wisata Investasi Domba tidak dibentuk melalui Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme penyelenggaraan investasi peternakan. Program ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Suco Nomor 188/23/35.09.23.2005/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak Unggul Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagai dasar administratif pembentukan kelompok peternak yang bertanggung jawab mengelola program. Selain itu, pelaksanaan program juga didukung oleh dokumen perencanaan desa, yaitu RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes, sehingga secara administratif memiliki legitimasi dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mekanisme investasi, tata kelola kelembagaan, sistem pembagian hasil, mekanisme penyelesaian risiko, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai investor menunjukkan bahwa implementasi program masih bertumpu pada kebijakan administratif pemerintah desa. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena keberhasilan suatu inovasi pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan peluncuran program, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, transparansi pengelolaan, akuntabilitas pelaksana, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Desa Suco dikenal sebagai salah satu desa yang aktif mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis potensi lokal. Komitmen tersebut tercermin dari dimasukkannya Program Wisata Investasi Domba ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Dukungan pemerintah desa terhadap program ini menunjukkan adanya upaya untuk

memanfaatkan potensi peternakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Meskipun demikian, dukungan kebijakan dan penganggaran saja belum menjamin keberhasilan implementasi program. Efektivitas pelaksanaan program tetap dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi antara pemerintah desa dengan kelompok peternak dan masyarakat sebagai investor dilakukan, sejauh mana sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sarana pendukung tersedia, bagaimana komitmen pelaksana dalam menjalankan program, serta bagaimana struktur birokrasi dan kelembagaan mampu mendukung keberlangsungan program. Selain itu, transparansi pengelolaan investasi, mekanisme pembagian hasil, koordinasi antaraktor, serta keberlanjutan promosi wisata juga menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi program.

Penelitian mengenai implementasi inovasi desa telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian, seperti implementasi desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan ekonomi lokal. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi program investasi peternakan berbasis wisata sebagai inovasi pembangunan desa masih relatif terbatas. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang menganalisis implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berupaya mengkaji bagaimana proses implementasi inovasi pembangunan desa berbasis investasi peternakan dijalankan melalui analisis terhadap aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, Selain memiliki nilai kebaruan, penelitian ini juga memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik dalam konteks inovasi pembangunan desa, khususnya pada sektor peternakan berbasis investasi masyarakat. Sementara itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Suco dalam

memperkuat tata kelola program, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, serta menyusun regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin keberlanjutan program di masa mendatang. Implementasi Program Wisata Investasi Domba menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menawarkan inovasi dalam pengembangan ekonomi desa, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan suatu inovasi pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah ternak atau besarnya partisipasi masyarakat sebagai investor, melainkan juga dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi inovasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis terhadap keempat dimensi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program, sekaligus menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Suco dalam meningkatkan efektivitas implementasi inovasi pembangunan desa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan Program Wisata Investasi Domba tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi peternakan maupun tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan. Kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan maupun keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program sekaligus menghasilkan

rekomendasi bagi Pemerintah Desa Suco dalam meningkatkan efektivitas inovasi pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam mengelola sistem investasi masyarakat, pemberdayaan kelompok peternak, serta tata kelola program berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
3. Apa dampak Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bagi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan tersebut, dapat diketahui tujuan dari adanya penelitian ini ialah :

1. Menganalisis implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam mengelola sistem investasi masyarakat, pemberdayaan kelompok peternak, serta tata kelola program berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III?
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
3. Menganalisis dampak Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bagi masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya temuan penelitian ini dapat menyediakan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Bagi Peneliti

Harapannya temuan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan empiris mengenai implementasi Program Wisata Investasi Domba di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Memberikan keterampilan akademik dan ilmu pengetahuan lainnya terutama dalam bidang ilmu pemerintahan dan administrasi publik.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Harapannya temuan penelitian ini bisa memberi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam perancangan kebijakan implementasi program inovasi daerah atau desa.

3. Peneliti Selanjutnya

Harapannya temuan penelitian ini bisa dipergunakan menjadi sumber informasi untuk para peneliti dalam pembuatan judul penelitian serta menjadikan sebagai pokok bahasan dalam penelitian kedepannya.